

MANAJEMEN PERTAHANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA

DEFENSE MANAGEMENT AND ITS IMPLICATIONS ON STATE SOVEREIGNTY

Aris Sarjito, Hikmat Zakky Almubaroq

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

arissarjito@gmail.com¹, zakkyauri94@gmail.com²

Abstrak - Manajemen pertahanan mengacu pada proses, kebijakan, dan prosedur yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan sektor pertahanan suatu negara. Ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, akuisisi, penyebaran, operasi, dan pemeliharaan kemampuan militer. Manajemen pertahanan berimplikasi signifikan terhadap kedaulatan negara karena berkaitan erat dengan kemampuan suatu negara dalam mempertahankan perbatasannya dan menjunjung tinggi keutuhan wilayahnya. Manajemen pertahanan yang efektif membutuhkan fokus yang kuat pada strategi, alokasi sumber daya, dan kesiapan operasional. Ini melibatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk militer, instansi pemerintah dan entitas sektor swasta. Dalam banyak kasus, manajemen pertahanan diperumit oleh pertimbangan politik, yang terkadang bertentangan dengan prioritas militer. Manajemen pertahanan juga berimplikasi pada kedaulatan negara dalam hal dampaknya terhadap hubungan internasional. Kebijakan dan kemampuan pertahanan suatu negara dapat meningkatkan atau mengurangi kedudukannya dalam komunitas internasional. Misalnya, negara dengan militer yang kuat dan cakap mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan yang menguntungkan atau berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian internasional. Di sisi lain, negara dengan sektor pertahanan yang lemah atau tidak stabil mungkin akan mengalami kerugian dalam negosiasi internasional, atau rentan terhadap ancaman eksternal. Secara keseluruhan, manajemen pertahanan yang efektif sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan keamanan nasional. Ini membutuhkan keseimbangan antara prioritas militer dan pertimbangan politik dan harus diupayakan dengan perspektif jangka panjang. Negara-negara yang memprioritaskan manajemen pertahanan dan berinvestasi dalam pengembangan kemampuan militernya lebih siap untuk mempertahankan kedaulatannya dan menegaskan posisi mereka dalam komunitas global.

Kata kunci: keamanan nasional, kedaulatan negara, manajemen pertahanan., *Strategic Role, Terrorism, Radicalism.*

PENDAHULUAN

Manajemen pertahanan merupakan aspek penting dari keamanan nasional dan memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Tujuan utama manajemen pertahanan adalah untuk melindungi suatu negara dari ancaman internal dan eksternal, sehingga memastikan integritas dan stabilitas teritorialnya (Gerginova, 1997).

Manajemen pertahanan melibatkan perumusan kebijakan, rencana, dan strategi untuk memastikan kesiapan kekuatan militer suatu negara dan penerahan sumber daya yang efektif untuk menanggapi setiap ancaman (Cohen, 1997).

Pentingnya manajemen pertahanan dapat dilihat dalam beberapa konteks, antara lain ancaman keamanan siber,

serangan teroris, dan agresi militer dari negara lain. Dengan menerapkan sistem manajemen pertahanan yang efektif, suatu negara dapat meminimalkan risiko dan kerusakan yang terkait dengan ancaman ini sambil memastikan keselamatan dan keamanan rakyatnya (Gates, 2009).

Selain itu, manajemen pertahanan sangat penting untuk hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lain. Ini membantu untuk memastikan bahwa suatu negara dianggap kuat dan mampu, sehingga menghalangi potensi agresor untuk mengambil tindakan apa pun terhadapnya (Krepinevich Jr, A. F., 2010).

Kesimpulannya, manajemen pertahanan adalah alat penting untuk menjaga kedaulatan suatu negara dan melindungi warganya dari bahaya. Sistem pertahanan yang dikelola dengan baik dan efektif dapat membantu mengurangi risiko dan menanggapi ancaman, sehingga menjamin stabilitas dan keamanan suatu negara.

Ancaman terhadap kedaulatan negara dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Intinya, mereka adalah faktor atau isu yang menantang kemampuan negara untuk mengatur dan mempertahankan kendali atas rakyat dan wilayahnya. Ancaman tersebut dapat mengganggu atau menggerogoti kekuasaan dan wibawa negara.

Berikut adalah beberapa contoh ancaman terhadap kedaulatan negara:

1) Globalisasi Ekonomi: Globalisasi telah menciptakan kondisi yang memungkinkan perusahaan transnasional beroperasi lintas batas

dengan mudah. Hal ini dapat menimbulkan situasi dimana korporasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan hukum negara yang kemudian dapat menggerogoti kedaulatan negara (Gallagher, K. P., 2009).

- 2) Lembaga Internasional: Keanggotaan dalam lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perdagangan Dunia dapat membatasi kemampuan suatu negara untuk mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan anggota lainnya.
- 3) Terorisme: Negara-negara dapat menghadapi risiko serangan teroris dari kelompok-kelompok di dalam wilayah mereka sendiri atau dari organisasi teroris eksternal. Serangan teroris dapat menantang kedaulatan negara karena dapat menggoyahkan institusi politik, merusak infrastruktur, dan merugikan warga negara (White, J. R., & Clear, T., 2003).
- 4) Serangan Siber dan Peperangan Siber: Serangan siber dapat menjadi sasaran peretas asing yang berusaha mencuri informasi sensitif, mengganggu jaringan komunikasi, dan merusak infrastruktur penting. Serangan-serangan ini dapat membahayakan keamanan nasional dan melemahkan kemampuan negara untuk melindungi warganya (Johnson, T. A. (Ed.), 2015).
- 5) Pelanggaran hak asasi manusia: Perlindungan hak asasi manusia yang tidak memadai dalam suatu negara

dapat mengakibatkan keresahan dan protes. Jika isu-isu ini tidak ditangani, mereka dapat berkembang menjadi gerakan yang lebih besar yang pada akhirnya menantang kedaulatan negara (Thoms, O. N., & Ron, J., 2007).

- 6) Intervensi Eksternal: Negara-negara eksternal dapat melakukan intervensi dalam situasi di mana mereka yakin negara tidak mampu melindungi warganya, seperti krisis kemanusiaan atau migrasi skala besar.
- 7) Perubahan Iklim: Dampak perubahan iklim, seperti bencana alam, dapat menyebabkan pengungsian internal dan migrasi yang menantang kemampuan negara untuk menyediakan sumber daya bagi warganya (Change, M. S. S. I. C., 2017).

Dengan demikian, kedaulatan negara sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang demokratis dan perlindungan hak-hak individu. Namun, banyak faktor yang dapat mengancam kedaulatan negara, dan seiring dengan perkembangan dunia, begitu pula ancaman-ancaman tersebut. Penting bagi pemerintah untuk tetap waspada dan responsif terhadap perubahan lanskap internasional dan domestik.

Manajemen Pertahanan

Ketika dunia menjadi semakin kompleks dan tidak dapat diprediksi, manajemen pertahanan telah menjadi bidang studi dan praktik yang penting. Tujuan utama manajemen pertahanan adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang muncul. Esai ini akan

memberikan gambaran tentang konsep kunci, tantangan, dan strategi dalam manajemen pertahanan (Bucur-Marcu, et al., 2010).

Manajemen pertahanan mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya dan kegiatan organisasi pertahanan. Ini melibatkan koordinasi berbagai departemen, seperti logistik, pengadaan, manajemen personalia, dan keuangan, untuk memastikan bahwa strategi dan tujuan tercapai secara efisien dan efektif (Leklem, E. J., 2021). Tujuan utama penyelenggaraan pertahanan adalah menjamin kesiapan dan kemampuan kekuatan pertahanan untuk melindungi kepentingan negara. Ini melibatkan pemeliharaan postur pertahanan yang kuat, memastikan ketersediaan peralatan dan perbekalan, melatih dan mengembangkan personel, serta mengelola anggaran dan sumber daya secara efektif. Manajemen pertahanan yang efektif membantu memastikan keamanan suatu negara dan keselamatan warganya (Tagarev, T., 2006).

Salah satu aspek yang paling mendasar dari manajemen pertahanan adalah alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya yang tepat merupakan elemen penting dari manajemen pertahanan yang efektif. Ini melibatkan identifikasi dan pengalokasian sumber daya dengan cara yang memaksimalkan dampaknya sambil menyeimbangkan prioritas dan batasan yang bersaing. Ini mencakup pengalokasian sumber daya seperti personel, peralatan, dan keuangan ke berbagai bidang organisasi pertahanan berdasarkan berbagai faktor

seperti persyaratan misi, tingkat risiko, dan sumber daya yang tersedia. Alokasi sumber daya yang efektif penting untuk memastikan bahwa organisasi pertahanan dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan aman dalam lingkungan yang terus berubah dan berpotensi bermusuhan (Fraga- Lamas, 2016).

Organisasi militer beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis dan berkembang, yang membutuhkan adaptasi dan penyesuaian yang konstan (Fjeldstad, Ø. D., et al., 2012) Organisasi militer beroperasi di lingkungan yang terus berubah dan harus beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan dan ancaman baru. Mereka harus fleksibel dan mampu menanggapi situasi tak terduga dalam wilayah operasional mereka. Pemimpin militer harus dapat menyesuaikan rencana dan strategi mereka secara real time, mengambil keputusan berdasarkan informasi terbaru yang tersedia. Mereka juga harus inovatif, terus mencari cara baru dan lebih efektif untuk menyelesaikan misi mereka. Dengan beradaptasi dan responsif terhadap perubahan, organisasi militer dapat mempertahankan keunggulan mereka di medan perang modern (Murray, W. (1997).

Dengan demikian, salah satu peran utama manajemen pertahanan adalah mengalokasikan sumber daya dengan cara yang memaksimalkan kemampuan dan kapasitas sambil meminimalkan risiko terhadap personel dan aset.

Untuk mencapai tujuan ini, para perencana pertahanan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang

kebutuhan dan tuntutan organisasi. Ini mungkin melibatkan keseimbangan prioritas yang bersaing seperti modernisasi, pelatihan, manajemen personalia, dan pengadaan. Selain itu, perencana pertahanan mungkin perlu mempertimbangkan faktor eksternal seperti risiko geopolitik, kendala keuangan, dan perubahan lingkungan ancaman.

Aspek penting lainnya dari manajemen pertahanan adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah aspek penting pertahanan (Orchowski, L. M., 2008). Ini melibatkan identifikasi potensi ancaman dan kerentanan, mengevaluasi kemungkinan dan dampak potensial dari ancaman tersebut, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghindarinya. Manajemen risiko yang efektif memungkinkan organisasi memprioritaskan sumber daya mereka, fokus pada risiko yang paling signifikan, dan menerapkan kontrol yang sesuai untuk melindungi aset dan orang-orang mereka. Ini adalah pendekatan proaktif yang dapat membantu mencegah atau meminimalkan kerusakan dari potensi serangan atau insiden (Rahmawati, I., 2017). Organisasi militer beroperasi di lingkungan yang berbahaya, dan risiko perlu dinilai dan dikurangi secara komprehensif. Ini membutuhkan pendekatan terstruktur dan sistematis, dan banyak organisasi pertahanan telah mengembangkan kerangka kerja dan metodologi untuk menangani manajemen risiko. Kerangka kerja dan metodologi ini bertujuan untuk mengelola risiko pada tingkat strategis

dan operasional organisasi. Beberapa kerangka kerja populer yang digunakan oleh organisasi pertahanan adalah:

- 1) Risk Management Framework (RMF) - kerangka kerja ini digunakan oleh Departemen Pertahanan AS (DoD) untuk mengelola risiko yang terkait dengan sistem teknologi informasi (TI) mereka (Amaghionyeodiwe, L. A., 2017).
- 2) National Industrial Security Program Operating Manual (NISPOM) - manual ini digunakan oleh kontraktor pertahanan untuk memastikan perlindungan informasi rahasia (Fields, J., 1995).
- 3) Defense Acquisition System – sistem ini digunakan oleh DoD untuk mengelola perolehan sistem persenjataan dan program pertahanan utama lainnya (Cilli, M., 2015).
- 4) Project Management Body of Knowledge (PMBOK) - kerangka kerja ini digunakan untuk mengelola risiko yang terkait dengan manajemen proyek di organisasi pertahanan (Guide, A., 2001).

Kerangka kerja dan metodologi ini membantu memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikelola secara efektif untuk melindungi kepentingan organisasi pertahanan dan pemangku kepentingannya.

Salah satu pendekatan umum adalah menggunakan matriks risiko untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Hal ini memungkinkan para manajer pertahanan untuk memfokuskan sumber daya mereka pada risiko yang

paling signifikan sambil memastikan bahwa risiko dimitigasi dengan tepat. Selain itu, perencanaan kontinjensi merupakan elemen penting dari manajemen risiko, yang melibatkan pengembangan respons terhadap potensi krisis dan keadaan darurat.

Tantangan utama dalam manajemen pertahanan adalah ketegangan terus-menerus antara sumber daya dan kebutuhan. Ketika ancaman baru muncul dan lingkungan strategis berubah, para perencana pertahanan harus terus-menerus menyesuaikan dan memprioritaskan kembali alokasi sumber daya mereka. Ini bisa menjadi proses yang menantang dan rumit, terutama ketika sumber daya langka dan ada banyak permintaan yang bersaing (Terziev, V., 2017).

Untuk mengatasi tantangan ini, manajer pertahanan dapat menggunakan kerangka kerja seperti Capability-Based Planning (CBP), yang memungkinkan perencana menyalurkan sumber daya dengan kemampuan yang diinginkan. Dengan berfokus pada kemampuan daripada sistem atau platform senjata khusus, CBP memungkinkan organisasi pertahanan menjadi lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan keadaan yang berubah (Tagarev, T., 2009).

Manajemen pertahanan memainkan peran penting dalam keamanan nasional dengan memastikan bahwa suatu negara dipersiapkan dengan baik dan diperlengkapi untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal. Ini penting karena menyediakan kerangka kerja yang diperlukan bagi militer untuk beroperasi

secara efektif dan efisien. Salah satu fungsi kritisnya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan militer. Misalnya, alokasi anggaran yang memadai harus dibuat untuk mendanai pelatihan, perlengkapan, penelitian, dan pengembangan untuk memastikan militer siap menghadapi setiap ancaman yang mungkin muncul

Fungsi kritis lain dari manajemen pertahanan adalah manajemen personalia. Ini melibatkan pengelolaan perekrutan, pelatihan, promosi, dan kesejahteraan keseluruhan personel militer. Manajemen personalia yang efektif sangat penting untuk menjaga moral dalam militer dan memastikan bahwa tentara terlatih dengan baik dan siap untuk melaksanakan tugas mereka.

Tantangan yang Dihadapi Manajemen Pertahanan

Manajemen pertahanan bukannya tanpa tantangan. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi manajemen pertahanan adalah sifat ancaman keamanan yang selalu berubah. Seiring kemajuan teknologi, ancaman baru muncul, sehingga militer perlu beradaptasi dan berkembang secara terus menerus. Selain itu, ancaman asimetris, seperti serangan dunia maya, terorisme, dan perang hibrida, menjadi lebih umum, sehingga memerlukan pendekatan baru dalam manajemen pertahanan (Warren, D. R., 1998). Ada beberapa tantangan yang dihadapi manajemen pertahanan, antara lain (Connors, C. L., & Malloy, M. A., 2007):

- 1) Lanskap geopolitik yang berubah dengan cepat: Manajer pertahanan harus terus menilai lingkungan keamanan global dan beradaptasi dengan ancaman yang muncul.
- 2) Kendala anggaran: Departemen pertahanan harus beroperasi dengan anggaran terbatas sambil mempertahankan tingkat kesiapan dan kemampuan yang tinggi.
- 3) Menarik dan mempertahankan personel yang berbakat: Rekrutmen dan mempertahankan personel yang terampil merupakan tantangan berkelanjutan bagi departemen pertahanan, khususnya di bidang yang sangat terspesialisasi.
- 4) Integrasi teknologi: Organisasi pertahanan harus mengintegrasikan teknologi yang berkembang pesat ke dalam operasi mereka sambil memastikan keamanan dan perlindungan terhadap ancaman dunia maya.
- 5) Mengelola rantai pasokan yang kompleks: Departemen pertahanan harus mengelola rantai pasokan yang kompleks untuk memastikan pengiriman peralatan dan sumber daya yang diperlukan dapat diandalkan dan tepat waktu.
- 6) Menjaga kesiapan dan logistik: Mempertahankan tingkat kesiapan dan logistik yang tinggi adalah kunci agar departemen pertahanan dapat dengan cepat menanggapi setiap ancaman keamanan.
- 7) Menyeimbangkan tuntutan operasional dan kesejahteraan personel: Manajer Pertahanan harus menyeimbangkan tuntutan

operasional misi mereka dengan kesejahteraan dan keselamatan personil mereka.

Mengatasi tantangan ini akan membutuhkan pengembangan solusi inovatif dan peningkatan kolaborasi antara manajemen pertahanan dan pemangku kepentingan utama lainnya.

Masa Depan Manajemen Pertahanan

Masa depan manajemen pertahanan kemungkinan akan dibentuk oleh teknologi baru, perubahan ancaman keamanan, dan kendala anggaran. Teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan, kendaraan tak berawak, dan robotika semakin diintegrasikan ke dalam operasi pertahanan, membuka peluang baru untuk manajemen pertahanan (Cheney, R. B., 1989).

Ancaman keamanan juga cenderung terus berkembang, memerlukan pendekatan manajemen pertahanan yang lebih dinamis, kreatif, dan berpikiran maju. Manajer pertahanan harus tetap berada di depan ancaman yang muncul dan bersedia berinvestasi dalam sumber daya yang diperlukan untuk menangkalnya secara efektif (Pyszczynski, T., et al., 1999).

Terakhir, keterbatasan anggaran tampaknya akan terus berlanjut, mengharuskan para manajer pertahanan menemukan cara-cara inovatif untuk beroperasi dalam anggaran yang semakin ketat tanpa mengorbankan keefektifan militer.

Manajemen pertahanan di masa depan akan menghadapi perkembangan yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Peran AI (Artificial Intelligent) dalam manajemen pertahanan: Dengan meningkatnya adopsi AI dalam operasi pertahanan, perannya dalam manajemen pertahanan juga menjadi kritis. Implikasi AI pada manajemen pertahanan seperti mengurangi beban kerja komandan dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan (Mori, S., 2018)
- 2) Cybersecurity and Information Warfare: Di masa depan, manajemen pertahanan akan berputar di sekitar dunia maya. Manajemen pertahanan akan beradaptasi dengan meningkatnya ancaman serangan siber dan strategi yang perlu dilakukan untuk melindungi informasi sensitif (Daras, N. J., 2018).
- 3) Penggunaan Drone dan Sistem Otonom: Penggunaan drone dan sistem otonom kemungkinan besar akan menjadi arus utama di masa mendatang. Manajemen pertahanan akan beradaptasi dengan integrasi teknologi ini ke medan perang, implikasi etis, dan tantangan potensial (Muram, F. U., & Javed, M. A., 2021).
- 4) Dampak globalisasi terhadap manajemen pertahanan: Globalisasi telah mempengaruhi industri pertahanan, dan manajemen pertahanan perlu beradaptasi untuk beroperasi dalam sistem global (Rizescu, A., & Tileagă, C., 2017).
- 5) Alokasi anggaran dan manajemen sumber daya: Aspek penting dari manajemen pertahanan adalah alokasi sumber daya. Birokrasi masa

depan perlu mengalokasikan sumber daya untuk menghadapi perubahan ancaman keamanan (Kennedy, P. S. J., 2017)

- 6) Hubungan antara komando sipil dan militer: diperlukan eksplorasi hubungan antara komando sipil dan militer selama bertahun-tahun dan bagaimana hal ini berkembang seiring waktu (Pion-Berlin, D., 2009).
- 7) Peran perusahaan militer swasta: Perusahaan militer swasta tampaknya memiliki peran yang tak terelakkan dalam manajemen pertahanan. Keterlibatan perusahaan-perusahaan ini akan mempengaruhi bentuk-bentuk manajemen pertahanan tradisional (Aning, K., Jaye, T., & Atuobi, S., 2008).
- 8) Antariksa sebagai perbatasan berikutnya untuk pertahanan: Meningkatnya minat berbagai negara terhadap antariksa telah membuka perbatasan baru untuk pertahanan. Manajemen pertahanan akan beradaptasi dengan medan pertempuran baru ini (Birkeland, B., 2019).
- 9) Perubahan peran militer dalam masyarakat sipil: Militer perlu beradaptasi di era di mana konflik melibatkan warga sipil dan pentingnya memiliki pasukan polisi yang lengkap.

Jadi, manajemen pertahanan merupakan fungsi kritis dalam keamanan nasional dan memerlukan manajemen sumber daya, personel, dan teknologi yang efektif. Pentingnya manajemen pertahanan tidak dapat dilebih-lebihkan,

terutama mengingat ancaman keamanan yang selalu berubah yang dihadapi negara-negara secara global. Terlepas dari tantangan yang dihadapi manajemen pertahanan, termasuk kendala anggaran dan sifat ancaman keamanan yang berubah, masa depan manajemen pertahanan memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan munculnya teknologi yang memberikan peluang baru untuk peningkatan manajemen.

Manajemen Pertahanan dan Implikasinya terhadap Kedaulatan Negara

Ketika dunia memasuki masa yang semakin kompleks dan tidak pasti, manajemen pertahanan telah menjadi komponen penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara dan penduduknya. Pada intinya, manajemen pertahanan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan penyebaran sumber daya untuk melindungi dari ancaman eksternal dan mempertahankan kedaulatan nasional. Namun, karena negara menghadapi tantangan baik dari aktor negara maupun non-negara, implikasi manajemen pertahanan terhadap kedaulatan negara menjadi semakin diperebutkan. Dalam esai ini, kita akan mengeksplorasi sifat manajemen pertahanan, perannya dalam menjaga kedaulatan negara, dan berbagai implikasi yang muncul dari penerapannya.

Pada tingkat paling dasar, manajemen pertahanan melibatkan pemanfaatan sumber daya seperti personel, persenjataan, dan teknologi untuk memastikan perlindungan

perbatasan negara dan warga negara. Ini termasuk mengembangkan strategi untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi ancaman, membangun kemampuan militer untuk bertahan dari serangan, dan terlibat dalam diplomasi untuk membangun aliansi dan mencegah agresi. Di dunia sekarang ini, manajemen pertahanan menjadi semakin kompleks karena munculnya aktor non-negara seperti kelompok teroris, proliferasi senjata nuklir, dan perkembangan teknologi baru seperti perang cyber. Akibatnya, negara harus menyesuaikan strategi pertahanan mereka untuk mengatasi ancaman baru ini.

Manajemen pertahanan sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan adalah prinsip bahwa suatu negara bebas dari campur tangan eksternal dalam urusan internalnya dan bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Tanpa manajemen pertahanan yang efektif, prinsip ini akan dikompromikan, membuat negara rentan terhadap ancaman eksternal dan merusak kemampuan mereka untuk mengatur diri mereka sendiri. Oleh karena itu, manajemen pertahanan yang efektif merupakan komponen kunci untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi keamanan warga negaranya.

Namun demikian, terdapat implikasi yang muncul dari penerapan manajemen pertahanan yang dapat menantang kedaulatan negara. Salah satu contohnya adalah potensi intervensi militer di negara lain yang dapat melemahkan kedaulatan negara tersebut. Meskipun intervensi semacam itu mungkin diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan

nasional, intervensi tersebut juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara, terutama jika negara yang bersangkutan tidak menyetujui intervensi tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi baru seperti drone tak berawak dapat menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi penyebarannya dan potensi penyalahgunaannya.

Implikasi lain dari manajemen pertahanan adalah potensi dampaknya terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Ketika negara mengambil tindakan untuk melindungi warganya dari ancaman, mereka dapat membatasi kebebasan warganya sendiri atas nama keamanan nasional. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara pelestarian kedaulatan negara dan perlindungan hak-hak individu. Penggunaan teknologi pengawasan untuk memantau warga, misalnya, dapat menimbulkan kekhawatiran seputar pelanggaran privasi dan kebebasan berekspresi.

Manajemen pertahanan merupakan aspek penting dari keamanan nasional, dan penerapannya yang tepat dapat memiliki implikasi yang luas bagi kedaulatan negara. Manajemen pertahanan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan penerapan kebijakan, strategi, dan sumber daya untuk melindungi suatu negara dari ancaman internal dan eksternal. Ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk pengadaan militer, pelatihan dan pendidikan, logistik, penganggaran, dan pengumpulan intelijen.

Implementasi kebijakan pengelolaan pertahanan yang tepat dapat berimplikasi luas terhadap kedaulatan negara karena memastikan kemampuan untuk melindungi perbatasan negara, warga negara, dan infrastruktur dari segala potensi ancaman. Sistem manajemen pertahanan yang kuat juga memungkinkan suatu negara memproyeksikan kekuatan dan pengaruh secara internasional dan mempertahankan statusnya sebagai negara berdaulat.

Tujuan utama dari manajemen pertahanan adalah untuk memastikan kesiapan dan kemampuan kekuatan pertahanan negara untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional. Ini termasuk tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, tetapi juga mengelola sumber daya, mengembangkan strategi, dan memastikan kesiapan untuk setiap potensi ancaman atau konflik. Pengelolaan sumber daya dan kegiatan pertahanan merupakan proses kompleks yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tingkat tinggi.

Manajemen pertahanan adalah suatu proses pengelolaan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Implikasi dari manajemen pertahanan yang baik adalah dapat menjaga dan memperkuat kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar

Beberapa implikasi dari manajemen pertahanan yang baik terhadap kedaulatan negara adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Kesiapan Pertahanan Negara.

Manajemen pertahanan yang baik dapat meningkatkan kesiapan pertahanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman, baik itu ancaman dari dalam maupun dari luar negeri.

Manajemen pertahanan melibatkan berbagai praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kekuatan militer suatu negara jika terjadi serangan. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi manajemen pertahanan negara adalah menjaga keseimbangan antara pertahanan yang efektif dan menjaga kedaulatan negara. Pasalnya, kesiapan pertahanan negara menyangkut berbagai aspek, antara lain menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, berbagi informasi intelijen, dan menghormati konvensi internasional. Implikasi dari manajemen pertahanan yang baik terhadap kedaulatan negara ada beberapa. Manajemen pertahanan yang baik dapat meningkatkan kesiapan pertahanan negara tanpa mengorbankan kedaulatan negara:

- 1) Meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar negara. Salah satu aspek penting dari manajemen pertahanan yang baik adalah meningkatkan kerja sama dan komunikasi antar negara. Ini memerlukan pembinaan hubungan diplomatik yang lebih baik dengan negara-negara tetangga dan berkolaborasi dalam masalah keamanan nasional. Dengan berbagi informasi intelijen, negara-negara dapat mengidentifikasi potensi ancaman dan melakukan tindakan

pencegahan. Kerja sama tersebut juga dapat meningkatkan kesiapan militer dengan meningkatkan latihan militer bersama, yang dapat melatih prajurit untuk merespons secara lebih efektif dan efisien bila diperlukan.

- 2) Menjaga keamanan perbatasan yang efektif. Implikasi lain dari manajemen pertahanan yang baik terhadap kedaulatan negara adalah menjaga keamanan perbatasan yang efektif. Dari sudut pandang militer, perbatasan suatu negara merupakan garis pertahanan pertama dan memainkan peran penting dalam melindungi kedaulatan nasional. Keamanan perbatasan yang efektif melibatkan penyediaan sumber daya yang memadai bagi militer untuk mencegah penyusupan dan menegakkan hukum. Dengan memiliki perbatasan yang jelas, negara dapat secara efektif melindungi wilayah mereka dan mencegah intrusi yang dapat melemahkan kedaulatan nasional.
- 3) Berinvestasi dalam kekuatan militer. Berinvestasi dalam kekuatan militer merupakan aspek penting lain dari manajemen pertahanan yang baik yang dapat meningkatkan kesiapan pertahanan negara tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Kemampuan militer suatu negara memainkan peran penting dalam menghalangi potensi ancaman. Berinvestasi dalam kekuatan militer melibatkan penyediaan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan bagi personel militer untuk memastikan

mereka memiliki keterampilan dan perlengkapan yang mereka perlukan untuk merespons secara efektif. Dengan memiliki militer yang kuat, negara dapat mencegah agresi tanpa mengorbankan kedaulatan mereka.

- 4) Pemerintahan yang baik dan akuntabilitas demokratis. Good governance dan akuntabilitas demokratis merupakan implikasi lain dari manajemen pertahanan yang baik terhadap kedaulatan negara. Manajemen pertahanan yang efektif mencakup memastikan bahwa pasukan militer bertindak sesuai hukum dan menghormati nilai-nilai demokrasi. Ini berarti memiliki sistem checks and balances yang meminta pertanggungjawaban pemimpin militer atas tindakan mereka. Ini juga melibatkan memastikan bahwa pengeluaran militer transparan dan dalam batasan anggaran negara. Dengan mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas demokratis, negara-negara dapat mempertahankan kedaulatannya sambil meningkatkan kemampuan pertahanan negaranya.
- Kesimpulannya, manajemen pertahanan yang baik dapat meningkatkan kesiapan pertahanan negara tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Dengan meningkatkan kerja sama dan komunikasi antar negara, menjaga keamanan perbatasan yang efektif, berinvestasi dalam kekuatan militer, dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas demokratis, negara dapat secara efektif menanggapi potensi ancaman sembari

menegakkan kedaulatan mereka. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kesiapan pertahanan negara dan menjaga kedaulatan negara untuk memastikan bahwa negara dapat mempertahankan diri secara efektif sambil mempertahankan kemerdekaan dan otonomi mereka.

Meningkatkan Daya Saing Negara

Dalam hal pertahanan, keberadaan alutsista atau Alat Utama Sistem Persenjataan merupakan bagian penting dari manajemen pertahanan. Dengan memiliki alutsista yang memadai, maka Indonesia akan semakin unggul dan memiliki daya saing yang lebih baik diantara negara-negara lainnya.

Ketika dunia semakin saling terhubung, konsep tradisional kedaulatan negara menjadi semakin tertantang. Munculnya perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan aktor global lainnya telah mempersulit negara untuk mempertahankan kontrol eksklusif atas wilayah dan sumber daya mereka. Dalam konteks ini, manajemen pertahanan yang baik telah muncul sebagai alat utama bagi negara-negara yang ingin mempertahankan kedaulatannya dan tetap kompetitif di arena global. Tersirat dalam konsep manajemen pertahanan yang baik adalah sejumlah strategi dan praktik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing negara. Ini termasuk:

1) Memelihara militer yang kuat: Salah satu aspek paling mendasar dari manajemen pertahanan yang baik adalah mempertahankan militer yang

kuat. Ini termasuk berinvestasi dalam perangkat keras militer, memberikan pelatihan berkualitas tinggi kepada tentara, dan memastikan bahwa angkatan bersenjata diperlengkapi dengan baik untuk mempertahankan negara dari ancaman eksternal. Militer yang kuat dapat mencegah calon agresor untuk menargetkan negara, sekaligus memberikan rasa aman di antara warga negara

- 2) Mengembangkan kapabilitas keamanan siber yang kuat: Di era di mana begitu banyak bisnis dilakukan secara online, keamanan siber telah menjadi aspek yang semakin kritis dalam manajemen pertahanan. Negara-negara yang mahir dalam keamanan siber lebih siap untuk menangkis serangan dari peretas dan aktor jahat lainnya, melindungi warga negara dan ekonomi mereka dari bahaya.
- 3) Membangun aliansi yang kuat: Tidak ada negara yang berada dalam ruang hampa, dan membangun aliansi yang kuat dengan negara lain dapat menjadi taktik yang efektif untuk meningkatkan daya saing. Dengan menjalin kemitraan dengan negara lain, suatu negara dapat mengakses pasar baru, mendapatkan akses ke sumber daya yang berharga, dan memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi internasional.
- 4) Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan: Inovasi telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dan menyatakan bahwa berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan

memiliki posisi yang lebih baik untuk tetap kompetitif dalam jangka panjang. Ini termasuk mendanai penelitian ilmiah dasar serta mengembangkan teknologi baru yang dapat dikomersialkan dan dijual ke pasar global.

- 5) Mempromosikan lingkungan bisnis yang menguntungkan: Terakhir, manajemen pertahanan yang baik melibatkan penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk memberlakukan kebijakan yang mendorong kewirausahaan, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mempromosikan perdagangan bebas. Dengan mengembangkan lingkungan di mana bisnis berkembang, suatu negara dapat menarik investasi dan meningkatkan semangat kewirausahaannya untuk bersaing di pasar global.

Secara bersama-sama, strategi-strategi ini menawarkan peta jalan bagi negara-negara yang ingin meningkatkan daya saing mereka di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Baik melalui membangun aliansi yang kuat, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, atau mempromosikan lingkungan bisnis yang menguntungkan, manajemen pertahanan yang baik dapat membantu negara mempertahankan kedaulatannya dan berkembang di arena global.

Meningkatkan Kemandirian Negara

Manajemen pertahanan yang baik juga dapat meningkatkan kemandirian negara dalam hal pertahanan, baik itu

dalam hal produksi dan pengembangan alutsista sendiri maupun dalam hal peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Indonesia untuk bertugas di bidang pertahanan.

Karena sifat dinamis dari lingkungan politik dan ekonomi, negara terus mencari cara untuk meningkatkan kedaulatan mereka. Konsep kedaulatan negara mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menjalankan kekuasaan atas wilayah dan rakyatnya sendiri. Manajemen pertahanan yang baik berperan penting dalam meningkatkan kemandirian negara dan menjaga kedaulatan negara. Esai ini akan mengeksplorasi manfaat implisit dari manajemen pertahanan yang baik terhadap kedaulatan negara.

Manajemen pertahanan yang baik mencakup strategi militer yang efektif, personel yang terlatih dengan baik, peralatan modern, dan anggaran yang memungkinkan militer melaksanakan tujuannya. Ketika sebuah negara berinvestasi dalam manajemen pertahanan yang baik, itu menciptakan efek pencegahan psikologis. Calon agresor terpaksa berpikir dua kali sebelum menyerang negara yang memiliki pertahanan kuat. Alhasil, kedaulatan negara terjaga, dan potensi penyerangan bisa diminimalkan. Dengan demikian, manajemen pertahanan yang baik menjamin kemandirian negara.

Manfaat implisit lain dari manajemen pertahanan yang baik adalah mencegah ancaman eksternal membahayakan keamanan internal. Negara yang memiliki sistem pertahanan yang kuat dapat dengan mudah

menangkal setiap upaya teroris, pemberontak, dan elemen kriminal lainnya untuk mengacaukan negara.

Selain itu, manajemen pertahanan yang baik memastikan bahwa suatu negara dapat merespons bencana alam dan keadaan darurat secara efektif. Negara yang telah berinvestasi dalam manajemen bencana dan tanggap darurat lebih baik ditempatkan untuk melindungi kedaulatannya jika terjadi keadaan darurat nasional. Misalnya, selama pandemi COVID-19 tahun 2020, negara-negara dengan manajemen pertahanan yang baik berhasil menahan virus dan melindungi warganya, sehingga kedaulatannya terjaga.

Terakhir, manajemen pertahanan yang baik memberikan peluang bagi suatu negara untuk berpartisipasi dalam urusan global dengan percaya diri. Sebuah negara yang memiliki sistem pertahanan yang kuat memiliki kursi di meja politik global. Negara seperti itu dapat mempertahankan kepentingannya di forum internasional, bernegosiasi dengan negara lain dengan pijakan yang sama, dan mempertahankan kedaulatannya tanpa campur tangan eksternal.

Kesimpulannya, manajemen pertahanan yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan kemandirian negara. Ini memastikan pencegahan psikologis, mencegah ancaman eksternal, memungkinkan negara untuk menanggapi keadaan darurat secara efektif, dan memberikan kesempatan bagi negara untuk berpartisipasi dengan percaya diri dalam urusan global. Dengan demikian, negara

harus berusaha untuk berinvestasi besar-besaran dalam manajemen pertahanan yang baik untuk melindungi kedaulatannya dan menjaga independensinya.

Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Rakyat

Dengan manajemen pertahanan yang baik, maka akan tercipta keamanan dan keselamatan bagi rakyat Indonesia dari berbagai ancaman baik itu ancaman dari dalam maupun dari luar negeri:

- 1) Tanggung jawab utama negara adalah memberikan keamanan dan keselamatan bagi warga negaranya. Manajemen pertahanan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab ini terpenuhi.
- 2) Tersirat dalam manajemen pertahanan yang baik adalah kemampuan menjaga kedaulatan negara. Ini berarti bahwa suatu negara harus memiliki sistem pertahanan yang efektif untuk menangkal potensi ancaman dan melindungi integritas teritorialnya.
- 3) Sistem manajemen pertahanan yang baik harus berpijak pada strategi komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek keamanan dan keselamatan. Ini termasuk fokus pada pencegahan, perlindungan, dan respons.
- 4) Manajemen pertahanan yang efektif memerlukan kerja sama semua tingkat pemerintahan, serta masyarakat sipil dan sektor swasta. Ini dapat mencakup perjanjian berbagi intelijen, kemitraan publik-

swasta, dan program keterlibatan masyarakat.

- 5) Manajemen pertahanan yang baik harus memasukkan teknologi dan inovasi baru. Ini dapat mencakup kecerdasan buatan, keamanan dunia maya, dan sistem pengawasan canggih yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman.
- 6) Manajemen pertahanan harus didukung oleh kerangka hukum yang jelas yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Kebijakan keamanan dan pertahanan negara harus transparan dan tunduk pada pengawasan demokratis.
- 7) Manajemen pertahanan yang baik membutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Ini termasuk sumber daya, pendidikan dan pelatihan, dan pemahaman bersama tentang pentingnya memastikan keamanan dan keselamatan rakyat.

Dengan demikian, manajemen pertahanan yang baik sangat berpengaruh terhadap kedaulatan negara, karena dengan menjaga dan memperkuat pertahanan negara maka kedaulatan negara dapat terjaga dan diperkuat.

Manajemen pertahanan mengacu pada keseluruhan manajemen sumber daya pertahanan negara, termasuk militer, intelijen, dan badan keamanannya. Ini mencakup pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, dan penyebaran sumber daya ini untuk melindungi negara dan kedaulatannya (Makinda, S. M., 1996).

Implikasi pengelolaan pertahanan terhadap kedaulatan negara sangat signifikan. Manajemen pertahanan seringkali terkait erat dengan masalah keamanan nasional, yang dianggap sebagai komponen penting dari kedaulatan suatu negara. Sistem pertahanan yang dikelola dengan baik dapat membantu melindungi negara dari agresi eksternal, menjaga perbatasannya, dan bertahan dari berbagai ancaman, seperti terorisme dan serangan dunia maya (Thakur, R., 2002).

Namun demikian, pengelolaan pertahanan juga dapat berimplikasi negatif terhadap kedaulatan negara. Dalam situasi di mana suatu negara menjadi terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi militer asing, kedaulatannya dapat dikompromikan. Hal ini karena tidak lagi sepenuhnya otonom dalam mengambil keputusan mengenai pertahanan dan keamanannya (Christiansson, M., 2010)

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa militerisasi yang berlebihan dan pengembangan teknologi militer yang canggih dapat menimbulkan risiko terhadap kedaulatan negara. Ini karena negara mungkin menjadi terlalu fokus pada pengembangan kemampuan militer, yang dapat menyebabkan agresi dan konflik dengan negara lain (Asmoro, 2022)

Oleh karena itu, meskipun manajemen pertahanan yang efektif sangat penting untuk melindungi kedaulatan negara, hal ini juga penting untuk diseimbangkan dengan aspek tata negara lainnya, seperti diplomasi dan keterlibatan dengan komunitas internasional. Ini dapat membantu

mencegah ancaman terhadap kedaulatan negara sambil juga mempromosikan kerja sama dan perdamaian internasional (Bermúdez Tapia, M., 2020).

Pertimbangan politik

Di zaman modern, kedaulatan negara adalah salah satu aspek politik yang paling krusial. Kedaulatan mengacu pada otoritas tertinggi negara, yang meliputi kekuasaan untuk mengontrol dan mengatur wilayah dalam batas-batasnya (Harrison, K., & Boyd, T., 2018). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya pertahanan sangat penting untuk kedaulatan negara mana pun. Manajemen pertahanan adalah proses pengorganisasian, perencanaan, sumber daya, pelaksanaan, dan pengendalian operasi untuk mencapai tujuan militer. Esai ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan politik manajemen pertahanan dan implikasinya terhadap kedaulatan negara (Koesrianti., 2013).

Manajemen pertahanan di negara mana pun tunduk pada banyak pertimbangan politik. Pertimbangan ini bisa bersifat internal atau eksternal dan mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain. Beberapa pertimbangan politik yang signifikan dalam manajemen pertahanan adalah sebagai berikut (Eichenberg, R. C., & Stoll, R., 2003):

- 1) Keamanan nasional: Masalah keamanan nasional adalah beberapa pertimbangan politik terpenting dalam manajemen pertahanan. Pertimbangan ini seringkali didorong oleh ketakutan akan agresi eksternal, terorisme, dan serangan dunia maya. Untuk mencapai keamanan nasional,

negara berinvestasi besar-besaran dalam sumber daya pertahanan, termasuk sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi.

- 2) Opini publik: Opini publik merupakan pertimbangan politik yang penting dalam manajemen pertahanan. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pertahanan negara dapat berimplikasi signifikan terhadap kedaulatan negara. Dengan demikian, negara harus menyeimbangkan antara memuaskan keinginan publik akan keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
 - 3) Alokasi anggaran: Sumber daya pertahanan mahal dan membutuhkan investasi besar dalam hal modal dan biaya operasional. Dengan demikian, negara harus mempertimbangkan alokasi anggaran mereka ketika merencanakan sumber daya pertahanan. Alokasi anggaran juga mempengaruhi kemampuan negara untuk mempertahankan kedaulatannya, karena sistem pertahanan yang didanai dengan buruk dapat membuat negara menghadapi ancaman eksternal.
- Pertimbangan politik dalam pengelolaan pertahanan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kedaulatan negara. Implikasi ini bisa positif atau negatif dan bisa bervariasi tergantung pada konteks tertentu. Beberapa implikasi utama dari pertimbangan politik dalam pengelolaan pertahanan terhadap kedaulatan negara adalah sebagai berikut:
- 1) Kemampuan militer: Sumber daya pertahanan sangat penting dalam mempertahankan kemampuan

militer. Kemampuan militer negara memainkan peran penting dalam memastikan kedaulatannya. Kemampuan suatu negara untuk melindungi perbatasan teritorialnya dari ancaman eksternal menentukan kedaulatannya. Dengan demikian, pertimbangan politik dalam pengelolaan pertahanan dapat mempengaruhi kemampuan militer negara, sehingga berdampak pada kedaulatannya.

- 2) Hubungan diplomatik: Kebijakan dan kemampuan pertahanan dapat berdampak pada hubungan diplomatik antar negara. Dampak ini bisa positif atau negatif, tergantung pada keadaan tertentu. Kemampuan pertahanan yang kuat dapat meningkatkan hubungan diplomatik negara dengan negara lain, sedangkan sumber daya pertahanan yang buruk dapat menyebabkan negara lain mempertanyakan kedaulatan negara.
- 3) Stabilitas ekonomi: Kebijakan pengelolaan pertahanan juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi. Pengeluaran pertahanan seringkali mengambil porsi yang signifikan dari anggaran negara, yang mempengaruhi sektor ekonomi lainnya. Sistem pertahanan yang tidak dikelola dengan baik dapat menguras sumber daya dari sektor lain, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mempengaruhi kedaulatan negara.
- 4) Perubahan demografis: Rekrutmen militer merupakan aspek kritis manajemen pertahanan. Dengan

demikian, perubahan demografis di suatu negara dapat mempengaruhi kekuatan militernya. Misalnya, populasi yang menua dapat mempengaruhi perekrutan militer negara, sehingga mempengaruhi kedaulatannya.

- 5) Aliansi strategis: Pembentukan aliansi strategis dengan negara lain dapat berimplikasi pada kedaulatan negara. Meskipun aliansi dapat memperkuat kemampuan pertahanan suatu negara, aliansi juga dapat mengakibatkan hilangnya kendali atas pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Hal ini berpotensi melemahkan kedaulatan negara.
- 6) Perjanjian internasional: Perjanjian internasional yang terkait dengan pertahanan dapat berimplikasi pada kedaulatan negara. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut mungkin harus mematuhi ketentuan tertentu yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk bertindak secara independen. Hal ini dapat berdampak pada kedaulatan suatu negara dengan membatasi kekuasaan pengambilan keputusannya.
- 7) Industri pertahanan: Pengelolaan industri pertahanan juga dapat berimplikasi pada kedaulatan negara. Sebuah negara yang terlalu bergantung pada kontraktor pertahanan asing mungkin tidak memiliki kendali penuh atas kemampuan pertahanannya. Selain itu, hal itu dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan manfaat

ekonomi lainnya yang terkait dengan memiliki industri pertahanan dalam negeri yang kuat.

- 8) Intervensi militer: Intervensi militer dapat berdampak signifikan terhadap kedaulatan negara. Suatu negara yang mengintervensi urusan dalam negeri negara lain dapat dianggap melanggar kedaulatannya. Masyarakat internasional juga dapat melihat tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.

Ringkasnya, pertimbangan politik terkait pengelolaan pertahanan dapat berimplikasi luas terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara-negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati dampak potensial dari kebijakan pertahanan mereka terhadap kedaulatan mereka.

Dampak hubungan internasional

Seiring dengan semakin mengglobalnya dunia, isu manajemen pertahanan dan implikasinya terhadap kedaulatan negara dalam hubungan internasional menjadi semakin penting (Brown, C., & Ainley, K. (2009). Manajemen pertahanan adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan kekuatan militer suatu negara, dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kedaulatan negara (Krasner, S. D., 2009).

Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pertahanan negara-negara anggota. Sementara kerja

sama internasional dapat bermanfaat dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan, hal itu juga dapat menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara dan kepentingan nasional.

Salah satu contohnya adalah perdebatan tentang penggunaan senjata otonom dan potensi dampaknya terhadap kedaulatan negara. Senjata otonom mampu membuat keputusan tanpa campur tangan manusia, dan penggunaannya menimbulkan banyak masalah etika dan hukum. Beberapa berpendapat bahwa pengembangan dan pengerahan senjata semacam itu merusak kedaulatan negara dengan mengurangi visibilitas dan akuntabilitas tindakan militer.

Isu lain yang berkaitan dengan pengelolaan pertahanan dan kedaulatan negara adalah alokasi sumber daya untuk pembelanjaan pertahanan. Banyak negara berjuang untuk menyeimbangkan kebutuhan pertahanan negara dengan prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, tekanan dari organisasi internasional dan ancaman eksternal dapat mengakibatkan penekanan yang tinggi pada pembelanjaan pertahanan, yang dapat berdampak pada kedaulatan negara.

Selain itu, pengaruh politik dapat berperan dalam manajemen pertahanan dan berimplikasi pada kedaulatan negara. Misalnya, bantuan militer dan bantuan dari kekuatan asing dapat dilihat sebagai pelanggaran kedaulatan negara jika melemahkan kemampuan negara penerima untuk membuat keputusan

independen terkait kebijakan pertahanannya.

Aspek lain dari manajemen pertahanan yang berimplikasi pada kedaulatan negara adalah perubahan dinamika konflik di dunia modern. Munculnya perang dunia maya, terorisme, dan perang nonkonvensional telah menantang gagasan tradisional tentang kedaulatan negara dan peran militer dalam hubungan internasional. Negara sekarang harus menghadapi ancaman baru baik secara domestik maupun internasional, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan kendali atas wilayah dan populasi mereka sendiri.

KESIMPULAN

Manajemen pertahanan merupakan komponen penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara dan warga negaranya. Namun, implikasinya terhadap kedaulatan negara sangat kompleks dan beragam. Sementara manajemen pertahanan yang efektif sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara, penyebaran intervensi militer dan teknologi baru dapat menantang legitimasi tindakan tersebut. Selain itu, potensi dampak terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia menyoroti perlunya keseimbangan yang hati-hati antara kepentingan keamanan nasional dan hak individu. Seiring negara terus menghadapi ancaman baru dalam lingkungan global yang terus berubah, manajemen pertahanan yang efektif akan tetap menjadi komponen penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Manajemen pertahanan merupakan aspek kritis keamanan nasional yang berimplikasi luas terhadap kedaulatan negara. Manajemen pertahanan yang efektif meningkatkan kemampuan suatu negara untuk membela diri dan berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan kemanusiaan internasional. Ini juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Namun, manajemen pertahanan juga dapat digunakan untuk menekan perbedaan pendapat internal dan menimbulkan ketegangan antar negara. Oleh karena itu, negara-negara perlu mencapai keseimbangan antara persyaratan pertahanan dan nilai-nilai demokrasi untuk menjaga kedaulatan mereka.

Pertimbangan politik dalam manajemen pertahanan memainkan peran penting dalam menentukan kedaulatan suatu negara. Kapabilitas militer, hubungan diplomasi, stabilitas ekonomi, dan perubahan demografi merupakan beberapa implikasi penting dari pertimbangan politik dalam pengelolaan pertahanan. Oleh karena itu, negara harus secara hati-hati menyeimbangkan kebijakan pertahanan mereka untuk memastikan mereka mempertahankan kedaulatannya sambil memenuhi harapan publik dan kendala anggaran.

Manajemen pertahanan dan implikasinya terhadap kedaulatan negara dalam hubungan internasional bersifat kompleks dan multidimensional. Sementara kerja sama internasional dapat bermanfaat dalam

mempromosikan perdamaian dan keamanan, hal itu juga dapat menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Ketika dunia menjadi semakin saling terhubung, penting bagi negara-negara untuk menyeimbangkan kebutuhan pertahanan nasional dengan prioritas lain dan bekerja untuk mempertahankan kemandirian dan otonomi mereka dalam menghadapi ancaman keamanan yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaghionyeodiwe, L. A. (2017). Risk Management Framework (RMF) and the Implementation Challenges. Proceedings of the Northeast Business & Economics Association.
- Aning, K., Jaye, T., & Atuobi, S. (2008). The role of private military companies in US- Africa policy. *Review of African political economy*, 35(118), 613-628.
- Asmoro, Novky, et al. (2022). Management of national security in analysis and threat assessment of Indonesian sovereignty *), Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia
- Bermúdez Tapia, M. (2020). The influence of military strength on national sovereignty in international relations. *Revista Científica General José María Córdova*, 18(30), 291-306. <http://dx.doi.org/10.21830/19006586.568>
- Birkeland, B. (2019). *Space: The Final Next Frontier*. *Minn. L. Rev.*, 104, 2061.
- Brown, C., & Ainley, K. (2009). *Understanding international relations*. Macmillan
- International Higher Education.
- Bucur-Marcu, H., Fluri, P., & Tagarev, T. (2010). *Defence management: An introduction*. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
- Change, M. S. S. I. C. (2017). *Climate change*.
- Cheney, R. B. (1989). *Defense management: Report to the president*. Department of Defense.
- Christiansson, M. (2010). *Solidarity and Sovereignty: The Two-Dimensional Game of Swedish Security Policy*. *Connections*, 10(1), 1–23. <http://www.jstor.org/stable/26326231>
- Cilli, M., Parnell, G. S., Cloutier, R., & Zigh, T. (2015). A systems engineering perspective on the revised defense acquisition system. *Systems Engineering*, 18(6), 584-603.
- Cohen, W. S. (1997). *Report of the quadrennial defense review*. DIANE Publishing.
- Connors, C. L., & Malloy, M. A. (2007, April). *Practical Challenges Facing Communities of Interest in the Net-Centric Department of Defense*. In *Fourth International Conference on Information Technology (ITNG'07)* (pp. 271-276). IEEE.
- Daras, N. J. (2018). *Cyber-security and Information Warfare*. Nova Science Publishers, Incorporated.
- Eichenberg, R. C., & Stoll, R. (2003). *Representing defense: Democratic control of the defense budget in the United States and Western Europe*.

- Journal of conflict resolution, 47(4), 399-422.
- Fjeldstad, Ø. D., Snow, C. C., Miles, R. E., & Lettl, C. (2012). The architecture of collaboration. *Strategic management journal*, 33(6), 734-750.
- Fraga-Lamas, P., Fernández-Caramés, T. M., Suárez-Albela, M., Castedo, L., & González-López, M. (2016). A review on internet of things for defense and public safety. *Sensors*, 16(10), 1644.
- Fields, J. (1995). National industrial security program. operating manual supplement.
- DEPARTMENT OF DEFENSE
WASHINGTON DC.
- Gallagher, K. P. (2009). Economic globalization and the environment. *Annual Review of Environment and Resources*, 34, 279-304.
- Gates, R. M. (2009). National defense strategy. DIANE Publishing.
- Gerginova, T. DIFFERENT DETERMINATIONS OF THE CONCEPT FOR NATIONAL SECURITY.
- Guide, A. (2001). Project management body of knowledge (pmbok® guide). In *Project Management Institute* (Vol. 11, pp. 7-8).
- Harrison, K., & Boyd, T. (2018). The state and sovereignty. In *Understanding political ideas and movements* (pp. 16-36). Manchester University Press.
- Johnson, T. A. (Ed.). (2015). *Cybersecurity: Protecting critical infrastructures from cyber attack and cyber warfare*. CRC Press.
- Kennedy, P. S. J., Tobing, S. J. L., & Lumbantoruan, R. (2017). *Manajemen Anggaran Pertahanan Nasional*.
- Koesrianti. (2013). International Cooperation Among States in Globalized Era: the Decline of State Sovereignty. *Indon. L. Rev.*, 3, 267.
- Krasner, S. D. (2009). *Power, the state, and sovereignty: essays on international relations*. Routledge.
- Krepinevich Jr, A. F. (2010). National security strategy in an era of growing challenges and resource constraints. Center for Strategic and Budgetary Assessments.
- Leklem, E. J. (2021). The South Korean military's peacekeeping missions: A story of effectiveness. In *The Routledge Handbook of Civil-Military Relations* (pp. 189- 201). Routledge.
- Makinda, S. M. (1996). Sovereignty and International Security: Challenges for the United Nations. *Global Governance*, 2(2), 149-168. <http://www.jstor.org/stable/27800134>
- Mori, S. (2018). US defense innovation and artificial intelligence. *Asia-Pacific Review*, 25(2), 16-44.
- Muram, F. U., & Javed, M. A. (2021, March). Drone-based risk management of autonomous systems using contracts and blockchain. In *2021 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)* (pp. 679-688). IEEE.
- Murray, W. (1997). *Thinking about revolutions in military affairs*.

- ASSISTANT SECRETARY OF DEFENSE (PUBLIC AFFAIRS) WASHINGTON DC.
- Orchowski, L. M., Gidycz, C. A., & Raffle, H. (2008). Evaluation of a sexual assault risk reduction and self-defense program: A prospective analysis of a revised protocol. *Psychology of Women Quarterly*, 32(2), 204-218.
- Pion-Berlin, D. (2009). Defense organization and civil—military relations in Latin America. *Armed Forces & Society*, 35(3), 562-586
- Pyszczynski, T., Greenberg, J., & Solomon, S. (1999). A dual-process model of defense against conscious and unconscious death-related thoughts: an extension of terror management theory. *Psychological review*, 106(4), 835.
- Rahmawati, I. (2017). the Analysis Of cyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), 37-52.
- Rizescu, A., & Tileagă, C. (2017). The effects of globalization on the transformation of organizational management. *journal of defense resources management*, 8(1), 135-140.
- Tagarev, T. (2006). Introduction to program-based defense resource management. *Connections*, 5(1), 55-70.
- Tagarev, T. (2009). Capabilities-based planning for security sector transformation. *Information & Security: An International Journal*, 24.
- Terziev, V., Madanski, V., & Kanev, D. (2017). Entry opportunities in the bulgarian military-educational system and ensuring of civil rights. *Proceedings of SOCIOINT*.
- THAKUR, R. (2002). Intervention, Sovereignty and the Responsibility to Protect: Experiences from ICISS. *Security Dialogue*, 33(3), 323-340. <http://www.jstor.org/stable/26298083>
- Thoms, O. N., & Ron, J. (2007). Do human rights violations cause internal conflict?. *Hum. Rts. Q.*, 29, 674.
- Warren, D. R. (1998). Defense Management Challenges Facing DOD in Implementing Defense Reform Initiatives. GENERAL ACCOUNTING OFFICE WASHINGTON DC ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT DIV.
- White, J. R., & Clear, T. (2003). *Terrorism: an introduction*. Wadsworth Thomson Learning.